

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional maupun Regional perlu disusun suatu Perencanaan strategik, yaitu berupa proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan salah satu Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan pada Visi, Misi Pemerintah Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka menengah Kementerian Perhubungan, Rencana Strategi (Restra) Kementerian Perhubungan Tahun 2014 -2019 dan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Nasional.

Oleh sebab itu, Renstra yang merupakan salah satu dokumen perencanaan dimaksud berisi tentang pemikiran-pemikiran yang strategi dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi yang tentunya tidak terlepas dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum yang terkait peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;

19. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Jambi 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Nomor : Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021;
21. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi;
22. Visi dan Misi Gubernur terpilih tahun 2016
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2016 – 2021. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di bidang pembangunan dan penyelenggaraan transportasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintergrasi dalam Provinsi Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2.	Sumber Daya SKPD
2.3.	Kinerja Pelayanan SKPD
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III.	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2016 - 2021
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.	Visi dan Misi SKPD
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3.	Strategi dan Kebijakan
BAB V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII.	PENUTUP

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi, memiliki tugas pokok sebagai berikut :

” MELAKSANAKAN KEWENANGAN DESENTRALISASI DAN TUGAS DEKONSENTRASI DI BIDANG PERHUBUNGAN DAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN AZAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI BIDANG PERHUBUNGAN ”

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor Perhubungan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Perhubungan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.















2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi yang dibebankan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi didukung oleh 172 orang sumber daya aparatur serta perlengkapan untuk kelancaran kegiatan rutin dan operasional.








Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terdiri dari :

- 2.2.1. 1 (satu) Orang Pejabat Eselon IIA
- 2.2.2. 5 (lima) Pejabat Eselon IIIA
- 2.2.3. 18 (delapan belas) Pejabat Eselon IVA,

Dengan komposisi Kepegawaian, adalah sebagai berikut :

	Golongan IV/d	: 1 orang
	Golongan IV/b	: 5 orang
	Golongan IV/a	: 10 orang
	Golongan III/d	: 15 orang
	Golongan III/c	: 22 orang
	Golongan III/b	: 74 orang
	Golongan III/a	: 11 orang
	Golongan II/d	: 7 orang
	Golongan II/c	: 9 orang
	Golongan II/b	: 11 orang
	Golongan II/a	: 7 orang
	Golongan I/d	: - orang
	Golongan I/c	: - orang
	Golongan I/b	: - orang

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, maka komposisi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Sebagai berikut :

	Pendidikan S2	: 24 orang
	Pendidikan S1	: 44 orang
	Pendidikan DIV	: 3 orang
	Pendidikan DIII	: 9 orang
	Pendidikan SLTA	: 86 orang
	Pendidikan SLTP	: 4 orang
	Pendidikan SD	: 2 orang

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selaku instansi teknis dilingkungan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugas dekonsentrasi dan desentralisasi di bidang Perhubungan. Oleh sebab itu, maka dirumuskanlah beberapa tujuan dan indikator target terhadap pelaksanaan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan perencanaan dan tersedianya infrastruktur transportasi baik darat, laut dan udara yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi demi terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasional transportasi.

Dengan Indikator Kinerja:

- Jumlah dokumen perencanaan
- Jumlah pembangunan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan.
- Nilai capaian pembangunan dan pemeliharaan.
- Jumlah kegiatan pengendalian dan pengaturan yang baik.

Dengan Target Capaian 5 (lima) Tahun:

- Tersusunnya dokumen perencanaan lintas bidang.
- Terpenuhinya sarana prasarana dan fasilitas keselamatan.
- Nilai capaian pembangunan dan pemeliharaan mencapai angka 80 persen.
- Seluruh kegiatan pengendalian dan pengaturan mencapai angka 80 untuk nilai capaian kelancaran.

2. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan menguasai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam rangka mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.

Dengan Indikator Kinerja:

- Jumlah Aparatur yang memiliki kemampuan teknis dibidang perhubungan
- Jumlah sistem perizinan yang baik.


Dengan Target Capaian 5 (lima) Tahun:

- 65 % petugas operasional memiliki pengetahuan teknis.
- 2 (dua) jenis perizinan LLAJ yang memiliki nilai capaian sistem 85 %.

Adapun capaian Rencana Startegi (Renstra) 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2010
1.	Menghasilkan perencanaan dan tersedianya infrastruktur transportasi baik darat, laut maupun udara yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi demi terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasional transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah usulan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan. • Nilai capaian pembangunan dan pemeliharaan. • Jumlah kegiatan pengendalian dan pengaturan yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh usulan pembangunan telah di dasarkan kepada hasil perencanaan yang baik. • Nilai capaian pembangunan dan pemeliharaan mencapai angka 90. • Seluruh kegiatan pengendalian dan pengaturan mencapai angka 85 untuk nilai capaian kelancaran.
2.	Menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia Perhubungan yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi serta mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM Perhubungan yang memiliki Diklat Teknis. • Jumlah sistem perizinan yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • 65 % petugas operasional memiliki pengetahuan teknis. • 2 (dua) jenis perizinan LLAJ yang memiliki nilai capaian sistem 85 %.

Berdasarkan tujuan strategis yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, maka hasil evaluasi pencapaian seluruh program yang tergambar dalam sasaran strategi Dinas Perhubungan kurun waktu 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

- 

Tujuan 1 : Menghasilkan perencanaan dan tersedianya infrastruktur transportasi yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan guna terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasiona transportasi.

Hasil evaluasi pencapaian Target Kinerja Renstra 2010 - 2015 :

SASARAN	PROGRAM	EVALUASI CAPAIAN TARGET
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi. 2. Meningkatnya kualitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi. 3. Terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasional transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. • Program Pengembangan LLAJ Jambi. • Program Pengembangan LLASDP Jambi. • Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasioan Kendaraan Bermotor. • Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan • Program Pembangunan Pelabuhan Laut • Program Pembangunan Bandara 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen perencanaan dan desain pembangunan fasilitas keselamatan transportasi, serta pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, 90 %. • Terlaksananya kegiatan pemilihan AKUT dan Penguji Teladan, 80 %. • Terlaksananya pengawasan, penertiban terhadap angkutan barang, 80 % . • Tersedianya/terba ngunnya fasilitas keselamatan transportasi darat (LLAJ dan SDP), laut dan udara, 80 %. • Terpeliharannya sarana dan prasarana transportasi, 70 %. • Terpasangnya Rambu-rambu Sungai, 70 %.



Tujuan 2 : Menghasilkan kualitas SDM yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi serta mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.

Hasil evaluasi pencapaian target Renstra 2010 – 2015 :

SASARAN	PROGRAM	EVALUASI PENCAPAIAN TARGET
1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia perhubungan yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi.	<ul style="list-style-type: none">• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.• Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Darat, Laut & SDP dan Udara, 100 %.• Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Jalan melalui pengendalian dan penertiban angkutan jalan, 100 %.
2. Mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.	<ul style="list-style-type: none">• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah melalui pelaksanaan Angkutan Lebaran, Natal dan Haji.• Terlaksananya peningkatan SDM di bidang Perhubungan.• Terlaksananya peningkatan SDM melalui Sosssialisasi kebijakan di bidang Perhubungan serta pendidikan dan pelatihan.

Selain itu juga, Dinas Perhubungan dalam peningkatan pelayanan jasa transportasi juga melaksanakan beberapa tugas pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah :

2.3.1. Pelayanan di bidang transportasi meliputi pemberian rekomendasi dan perizinan seperti :

- Pemberian Izin Trayek lintas Kabupaten/Kota dan Kartu Pengawasan (AKDP).
- Pemberian Izin Insidentil lintas Provinsi dan Izin Angkutan Barang Khusus.
- Pemberian Surat Keterangan Rubah Bentuk/Mutasi dan Surat Keterangan Bebas Uji Pertama Kali.

- Pemberian Advis/Rekomendasi persetujuan Izin Trayek lintas Provinsi (AKAP).
- Penyiapan bahan rekomendasi pemberian Izin Ekpedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
- Penyiapan bahan rekomendasi pemberian persetujuan Izin terbang perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antara kabupaten/kota dalam provinsi dengan pesawat di atas 30 seat.
- Pemberian rekomendasi izin penetapan lokasi, pertimbangan teknis, pemantauan pelaksanaan izin bandara umum yang melayani pesawat udara di atas 30 seat.
- Pemberian izin pembangunan bandara khusus yang pesawat udara di atas 30 seat dan ruang udara sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandara umum.
- Pemberian Sertifikasi Kapal, Izin Trayek Angkutan Sungai Lintas Kabupaten/Kota, Izin Gandeng dan Izin Usaha Angkutan Sungai.
- Izin Gandeng dan Izin Usaha Angkutan Sungai.
- Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Baru/Perubahan
- Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Baru
- Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Baru
- Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Baru/Perubahan
- Izin Usaha Perusahaan Bongkat Muat Baru/Perubahan
- Izin Usaha Perusahaan Tally Baru/Perubahan
- Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPER) Lintas Pelabuhan Antar Kota Dalam Provinsi Baru//Perubahan
- Izin Trayek Kapal Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi

- Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Baru/Penyesuaian
- Izin Pembangunan/ Pengoperasian Pelabuhan Laut Regional
- Izin Usaha Depo Peti Kemas Baru/Penyesuaian

Dalam rangka menunjang terselenggaranya pelayanan tersebut diatas serta pelayanan-pelayanan administratif lainnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dilaksanakan oleh : 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris dengan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang dengan 12 (Dua belas) Seksi serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Seksi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Peluang.

- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Provinsi Jambi dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Peraturan Gubernur Jambi No. 30 Tahun 2008, merupakan payung pelaksanaan tugas dan wewenang sektor perhubungan di daerah dalam rangka pengembangan/peningkatan sarana/ prasarana perhubungan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- Dukungan dari Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat pengguna jasa perhubungan untuk menjadikan perhubungan sebagai sektor andalan dalam mendorong, mendukung dan menunjang peningkatan perekonomian daerah.
- Indikasi meningkatnya demand transportasi sebagai dampak dari membaiknya perekonomian daerah.

- Forum Gubernur dan Agenda Sumatera yang merupakan embrio untuk mengembangkan sektor perhubungan di wilayah regional sumatera.
- Pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan kerjasama ekonomi regional IMS-GT/SIBAJI dan IMT-GT, sebagai peluang yang cukup besar untuk meningkatkan peran sektor perhubungan sebagai pendorong, penggerak dan penunjang perekonomian dalam rangka meningkatkan daya saing produk daerah di pasar Regional, Nasional dan Internasional.
- Kebijakan dan program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang ditunjang dengan Tol Laut menjadikan sektor transportasi sebagai ujung tombak dalam kelancaran dan keberhasilan pembangunan.
- Penetapan kawasan timur Pulau Sumatera sebagai koridor ekonomi dan kawasan Pantai Timur Jambi sebagai Kawasan Strategis Provinsi menjadikan transportasi sebagai sektor strategis baik sebagai pusat distribusi maupun penunjang sektor lain.

2.4.2. Tantangan.

- Pemberlakuan perdagangan bebas dan era globalisasi yang merupakan ancaman utama bagi daerah dan sektor perhubungan untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain.
- Potensi sumber daya daerah Jambi yang memerlukan dukungan kelancaran sektor perhubungan dalam rangka menekan biaya transportasi, sehingga dapat memiliki nilai jual dan lebih kompetitif di pasar regional, nasional dan internasional.
- Adanya upaya daerah lain untuk menarik pemasaran komoditas Provinsi Jambi ke daerahnya dengan memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki, merupakan tantangan yang perlu disikapi dengan arif sebagai upaya

untuk memacu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana perhubungan yang ada.

Strategi pengembangan infrastruktur perhubungan ke depan, perlu dicermati dan dikembangkan melalui penyusunan strategi yang lebih baik dan berkesinambungan dalam kaitannya dengan letak dan posisi Jambi yang cukup strategis, utamanya dalam menjadikan Jambi sebagai pusat pelayanan.

ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu-isu Strategis yang berkembang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dimaksudkan adalah untuk merumuskan strategi pembangunan sektor perhubungan yang tepat, terarah dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk melihat Isu Strategis dimaksud dilakukan dengan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

3.1.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal.

Yaitu analisis terhadap faktor lingkungan yang berada di dalam organisasi/institusi sendiri, berupa kekuatan yang dapat menunjang percepatan/peningkatan pembangunan perhubungan serta kelemahan yang kemungkinan dapat menghambat kemajuan/ rencana yang sudah disusun. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan tersebut, maka diharapkan seluruh jajaran Dinas Perhubungan akan dapat mengantisipasi lebih dini dan mencari alternatif yang lebih baik, sehingga rencana yang telah disusun dapat terus berjalan. Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) di Sektor Perhubungan Provinsi Jambi antara lain :

3.1.1. Kekuatan.

- Tersedianya jaringan transportasi yang telah mampu menjangkau seluruh wilayah dan pusat-pusat kegiatan utama.
- Tersedianya moda angkutan jalan, sungai, laut dan udara sebagai sarana pendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat.

- Tersedianya Sumber daya manusia perhubungan yang diharapkan mampu melaksanakan program kegiatan dan operasional sektor perhubungan.

3.1.2. Kelemahan.

- Kualitas dan daya dukung infrastruktur transportasi yang relatif rendah, khususnya prasarana jalan dan jembatan dengan MST maksimal 8 ton dan lebar rata-rata 6 meter. Dilain pihak kemajuan teknologi transportasi yang semakin berkembang dengan daya angkut semakin besar (tekanan gandar mencapai lebih dari 12 ton), sehingga jalan dan jembatan yang ada tidak mampu bertahan lama (sering mengalami kerusakan).
- Infrastruktur Perhubungan yang rata-rata belum mampu memberikan rasa aman, nyaman dan selamat kepada pengguna jasa perhubungan.
- Masih rendahnya pemahaman dan disiplin masyarakat pengguna jasa perhubungan, penyedia jasa dan pemakai jalan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan, sehingga sering terjadi overlapping dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Tidak adanya hubungan vertikal antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga menyulitkan dalam koordinasi dan pemantauan kegiatan transportasi.
- Masih minimnya sumber daya manusia perhubungan yang memiliki kompetensi, kualifikasi teknis dan profesional di bidang perhubungan.
- Minimnya sumber dana untuk pembangunan/ peningkatan dan pemeliharaan sarana/prasarana perhubungan, dalam rangka mewujudkan sarana/ prasarana yang representatif dan memenuhi standar Nasional dan Internasional.

3.1.2. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Eksternal.

Yaitu analisis terhadap faktor lingkungan eksternal organisasi yang memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung bagi pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi Dinas Perhubungan. Analisis lingkungan eksternal ini meliputi Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat).

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2016 – 2021.

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 yang disusun dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Gubernur Jambi 2016-2021 serta Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

3.2.1. Visi

Visi Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan yaitu **"JAMBI TUNTAS 2021"**. Mewujudkan Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera pada Tahun 2021. Dimana di dalam visi tersebut Provinsi Jambi pada tahun 2021 akan mencapai :

1. Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis .
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
4. Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.
5. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah.
6. Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

Visi Gubernur-Wakil Gubernur secara prinsip harus sejalan dengan visi SKPD Dinas Perhubungan yang tentunya dalam pencapaian visi harus didukung dengan infrastruktur yang baik, karena dengan infrastruktur yang memadai tentunya pola pergerakan perekonomian akan menjadi lancar.

Selain itu didalam pembangunan harus adil artinya fasilitas sarana prasarana dan keselamatan transportasi tentunya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sehingga dengan pemerataan ini transportasi yang menjadi penggerak, pendorong dan penunjang ekonomi akan berfungsi dengan baik di setiap daerah.

3.2.2. Misi

Visi Gubernur-Wakil Gubernur Jambi tersebut diatas dijabarkan ke dalam Misi Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Selanjutnya berpijak dari Misi Gubernur-Wakil Gubernur ini, maka Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan sektor transportasi harus mampu mendorong, mendukung dan menunjang sektor lain.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KAB/KOTA.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan RI Tahun 2015-2019 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 tahun. Renstra memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedomanan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019 saat ini masuk dalam tahapan ke-3 dari rangkaian perencanaan jangka panjang 2005-2025. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan disusun dengan memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah setiap unit kerja Eselon I serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan bidang transportasi.

Kalau kembali kita telaah dengan perencanaan strategi dari Kabupaten/Kota, maka seluruh program kegiatan yang belum ada di daerah telah direncanakan dan dipadukan dengan program rencana strategis Provinsi maupun Nasional. Sementara itu, dalam mensinkronkan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan RI, sesungguhnya Rencana strategis Kementerian tersebut yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 telah menetapkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi sebagai berikut:

1. **Keselamatan dan Keamanan Transportasi**, dengan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi:
 - Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
 - Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
2. **Pelayanan Transportasi**, dengan aspek pelayanan transportasi, yang meliputi:
 - Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
 - Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
 - Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
 - Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
 - Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
 - Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;
3. **Kapasitas Transportasi**, dengan aspek kapasitas transportasi, yang meliputi :
 - Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
 - Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
 - Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
 - Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

- Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 ini, dilakukan dengan metode bottom up dan top down serta mempedomani aturan dan ketentuan yang ada sehingga antar kepentingan pusat, daerah provinsi maupun kabupaten dapat saling bersinergi dan saling mendukung. Pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana transportasi dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih didalam pelaksanaan pembangunan maupun pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas. Sinergitas dan keterpaduan program kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menghindari terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi yang dapat berujung pada penyelenggaraan pelayanan transportasi, Sinkronisasi program kegiatan pembangunan transportasi ini selain itu juga untuk mendukung dan mengakomodir usulan program kegiatan sesuai kebutuhan di daerah dengan ketentuan Kabupaten/Kota telah menyiapkan lahan dan disiapkan dokumen perencanaannya.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, merupakan pedoman utama dalam menyusun kebijakan pembangunan baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah.

Dalam RTRW tersebut, mengatur rencana pola ruang yang artinya lebih kepada pemanfaatan ruang wilayah dan rencana struktur ruang yang merupakan bentuk dan upaya memadukan ataupun merencanakan konektivitas pusat-pusat perkotaan melalui perwujudan sistem yang termasuk didalamnya memperkuat

konektifitas tersebut melalui transportasi baik darat, laut dan udara.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi. Telaahan tersebut mulai dari Struktur Ruang yang terdiri dari Sistem Transportasi Jalan, Jaringan Kereta Api, Sistem Transportasi Sungai, Sistem Transportasi Laut dan Sistem Transportasi Laut maupun pola ruang yang telah diatur. Selain itu juga, sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, maka telah diprioritaskan pembangunannya trase untuk wilayah Sumatera khususnya Provinsi Jambi sampai tahun 2033 yang menjadi prioritas utama meliputi Lintas Utama dengan Prioritas sedang pada lintas **Jambi – Betung**, Lintas Utama dengan prioritas rendah pada lintas **Pekanbaru – Jambi**.

Selain itu juga, sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, bahwa sebagian besar merencanakan jaringan rel KA seperti Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Muara Jambi, Kota dan Tanjung Jabung Timur, namun untuk jaringan rel KA yang lokal sedang disusun *master plan* perkeretaapian Provinsi Jambi, yang pembangunan fisiknya nanti dapat diusulkan melalui APBN, maupun APBD baik Kabupaten maupun Provinsi guna menyambung trase utama yang menjadi prioritas Pembangunan Pusat atau Sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Untuk pengembangan transportasi sungai dan laut dalam wilayah Provinsi Jambi, telah dipadukan antara rencana pengembangan di Kabupaten/Kota dengan Provinsi maupun Pusat sehingga dapat sejalan di dalam pengembangan dermaga/pelabuhan baik sungai maupun laut.

Indikasi program dalam mendukung tujuan dan sasaran kebijakan Tata Ruang Provinsi khususnya Bidang Transportasi, antara lain:

1. peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Sultan Thaha;
2. pengembangan Terminal Barang Regional;
3. peningkatan fasilitas terminal regional tipe B;

4. pengembangan pelabuhan laut nasional Ujung Jabung, Kuala Tungkal dan Muara Sabak;
5. pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal tipe C menjadi tipe B;
6. Jalan Akses Bandara yang terdiri dari ruas jalan: Jalan Baru Akses Bandara Sultan Thaha Jambi; Jalan Akses Bandara Bungo; dan Jalan akses Bandara Depati Parbo Kerinci.
7. Jalan Akses Pelabuhan yang terdiri dari ruas jalan akses pelabuhan Ujung Jabung (*Simpang Pudak - Suak Kandis - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Ujung Jabung*) dan ruas akses Pelabuhan Kuala Tungkal (*Simpang Tuan – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Tanjung Jabung Barat; Batas Kabupaten Muaro Jambi – Pematang Lumut; Pematang Lumut – Batas Kota Kuala Tungkal; Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal; Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal; Jalan Sri Sudewi Kuala Tungkal; dan jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal*). Serta ruas jalan akses pelabuhan Muara Sabak (*Jalan Batanghari II - Simpang Zona Lima ; dan Simpang Zona Lima - Muara Sabak – Simpang Muara Sabak*)
8. Jalan akses Pelabuhan Talang Duku yaitu ruas jalan Batas Kota Jambi - Talang Duku.
9. Pelabuhan sungai yang terdiri dari : Pelabuhan Muara Tembesi di Kabupaten Batang Hari; Pelabuhan Muara Tebo di Kabupaten Tebo; Pelabuhan MuaraBungo di Kabupaten Bungo; Pelabuhan Pauh, Pelabuhan Mandiingin dan pelabuhan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun; Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan Pelabuhan Tungkal Ulu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Pembangunan jaringan angkutan kereta api provinsi melalui pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera; Pembangunan jaringan kereta api provinsi yang menghubungkan Lampung– Palembang–Jambi - Pekanbaru– Medan dan Banda Aceh, serta menghubungkan Wilayah Barat Sumatera;

11. Pembangunan Jaringan jalur kereta api khusus dan Prasarana perkeretapiian
12. Optimalisasi pengelolaan kawasan pesisir dan pelabuhan; dan Pengembangan sarana penunjang kegiatan pelabuhan.
13. pengembangan bandar udara umum Sultan Thaha Jambi di Kota Jambi sebagai bandar udara utama;
14. pengembangan bandar udara umum Bungo di Kabupaten Bungo sebagai bandar udara pengumpul; dan
15. pengembangan bandar udara umum Depati Parbo di Kabupaten Kerinci sebagai bandar udara pengumpan.

3.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

Pembangunan Sektor Transportasi sebagai satu kesatuan sistem tidak terlepas dari pengaruh secara regional maupun nasional. Demikian juga dengan system transportasi wilayah di Provinsi Jambi, dimana pengaruh issue-isue strategis pengembangan/pembangunan transportasi di tingkat regional dan nasional akan terkait dan memicu dampak terhadap transportasi wilayah Provinsi Jambi. Oleh karena itu di dalam menyusun Rencana Strategis Sektor Transportasi Provinsi Jambi perlu dikaji dan disinergikan dengan program strategis sektor transportasi Pulau Sumatera. Indikasi Program Strategis pembangunan sektor transportasi yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dilaksanakan sesuai dengan system dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Indikasi Program strategis pembangunan sektor transportasi Pulau Sumatera, meliputi :

1. Pembangunan jaringan lintas timur dengan prioritas tinggi yang menghubungkan kota-kota : Bakauheni-Ketapang-Labuhan Maringgai-Sukadana-Menggala-Mesuji-Kayu Agung-Palembang—Pangkalan Balai-Betung-Jambi-Rengat-Pekanbaru-Dumai-Rantau Prapat-Kisaran-Tebing Tinggi-Lubuk Pakam-Medan-Binjai-Langsa-Lhokseumawe-Banda Aceh;

2. Pembangunan jaringan jalan lintas tengah dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota : Bakauheni-Kalianda-Bandar Lampung-Bandar Jaya-Kotabumi-Bukit Kemuning-Blambangan Umpu-Baturaja-Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau-Muara Bungo-Solok-Bukit Tinggi-Kotanopan-Penyabungan-Padang Sidempuan-Tarutung-Sidikalang-Kutacane-Blang Kejeran-Takengon-Geumpang-Keumala-Jantho-Seulimeun-banda Aceh;
3. Pembangunan jalan lintas barat dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota : Bandar Lampung-Pringsewu-Kota Agung-Krui-Manna-Bengkulu-Painan-Padang-Pariaman-Simpang Empat-Natal-Batumundom-Sibolga-Barus-Subulussalam-Tapak Tuan-Meulaboh-Banda Aceh;
4. Pembangunan jaringan jalan pengumpan yang menghubungkan lintas barat, lintas tengah dan/atau lintas timur dengan prioritas tinggi yang menghubungkan kota-kota : Simpang Peut-Jeuram-Beuting Ateuh-Takengon-Biuren-Babahron-Trangon-Blang Kejeran-Pindit-Lokop Peureulak-Jamto-Lamno-Singkil-Sidikalang-Kabanjahe-Medan-Sibolga—Tarutung-Pematang Siantar-Tebing-Tinggi-Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru; Kiliran Jao-Rengat-Kuala Enok; Kiliran Jao-Teluk Kuantan-Pekanbaru; Pekanbaru-bangkinan-Rantau berangin; Simpang Kumuh-Kota tengah-Rangau-Duri; Sei Akar-Bagan Jaya-Enok; Rumba Jaya-Bagan Jaya-Enaok-Kuala Enok; Ujung Batu-Rokan-Batas Sumbar; Muara Bungo—Jambi-Muara Sabak; Sungai Penuh-Sarolangun-Tembesi-Jambi; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu; Tanjung Iman-Muara Sahung-Baturaja-Muara Enim-Palembang-Tanjung Api-Api; Muntok-Pangkal Pinang; Tanjung Pandan-Manggar; Krui-Liwa-Bukit Kemuning-Labuhan Maringgai-Simpang Sidomulyo-Tegineneng Metro-Sukadana dan Terbanggi Besar-Menggala.
5. Pembangunan jaringan jalan bebas hambatan pada jalur-jalur padat yang menghubungkan kota-kota.
6. Pembangunan jembatan Sumatera-jawa melalui Selat Sunda.

Indikasi Program Strategis pembangunan system jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera diwujudkan secara bertahap menurut prioritas, meliputi :

1. Pembangunan system jaringan dengan prioritas tinggipada jalur : Tarahan-Bandar Lampung-Balaraja-Blimbing-Muara Enim; Banda Aceh-Bireun-Lhokseumawe-Langsa-Belitang-Medan; Medan-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat-Dumai-Duri-Pekanbaru.
2. Pembangunan system jaringan dengan prioritas sedang pada jalur : **Pekanbaru-Rengat-Jambi-Betung-Palembang-Kayu Agung-Mangais-Bakauheni**; Bengkulu-Muko Muko-Padang-Pariaman-Sibolga-Tapaktuan-Meulaboh-Banda Aceh; **Muara Enim-Tebing Tinggi-Lubuk Linggau-Muaro Bungo-Teluk Kuantan-Pekanbaru**.
3. Pembangunan system jaringan dengan prioritas rendah pada jalur : Sibolga-Padang Sidempuan-Rantau Parapat-Pematang Siantar-Tebing Tinggi-Kisaran-Tanjung Balai; Betung-Sekayu; **Sengeti-Muara Sabak**; Bengkulu-Tebing Tinggi-Padang-Padang Panjang-Solok-Muaro; Muaro-Teluk Kuantan-Rengat-Kuala Enok; **Muara Bungo-Jambi**; Muara Enim-Prabu Mulih-Kertapati-Palembang dan Palembang-Tanjung Api Api.

Indikasi Program Strategis pembangunan system jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Pulau Sumatera diwujudkan secara bertahap menurut prioritas, meliputi :

- a. Pengembangan jaringan transportasi sungai untuk pelayanan angkutan lintas antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang diarahkan pada daerah-daerah potensial di Pulau Sumatera dan membuka daerah terisolir.
- b. Pengembangan angkutan sungai pada lintas-lintas yang sulit dikembangkan dengan jaringan jalan pada sungai-sungai : Musi, **Batanghari** dan Indragiri.
- c. Pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi dan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dengan interaksi kuat di Pulau Sumatera yang meliputi : Sabang-Banda Aceh, Sinabung-Labuhan Haji, Sinabung-Meulaboh, Singkil-Pulau

Banyak, Medan-Batam-Medan Lhokseumawe, Gunung Sitoli-Sibolga, Medan-Pangkal Pinang, Pangkal Pinang-Tanjung Pandan, Palembang-Muntok, Tanjung Pandan-Mentawai, **Kuala Tungkal-Tanjung Pinang**, Dumai-Bengkalis-Tanjung Balai Karimun-Batam-Pekanbaru-Batam, Batam-Natuna, Tua Pejat-Padang, Enggano-Bengkulu.

Indikasi Program Strategis pembangunan system jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagiandari system jaringan transportasi laut di Pulau Sumatera diwujudkan secara bertahap menurut prioritas, meliputi :

- a. Kandidat Pelabuhan Hub Internasional di Batam dan Sabang dengan prioritas tinggi
- b. Pelabuhan Internasional di Belawan Medan dan Teluk Bayur Padang dengan prioritas tinggi
- c. Pelabuhan Internasional di Lhokseumawe, Dumai dan Sibolga dengan prioritas sedang
- d. Pelabuhan nasional di Malahayati, Meulaboh, Tanjung Balai, Asahan, Pulau Bai, Tembilahan, Ranai, Kuala Tanjung, Maro Sulit, **Muara Sabak**, Tanjung Api Api, Tanjung Kedabu, Pulau Kijang, Kuala enok, Perawang, Pulau Sambu, Dabo/Singkep, Sungai Pakning, Buatan, Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun dengan prioritas sedang.
- e. Pelabuhan regional di Singkil, Kuala Langsa, Gunung Sitoli, Pangkalan Brandan, Bagan Siapiapi, Pangkalan Dodek, Teluk Dalam, Sinabang, Bintuhan, Kuala Gaung, Kuala Tungkal, Nipah Panjang, Panipahan, Panjalal, Serasan, Sungai Liat, Tanjung Batu, Kota Agung, Sungai Guntung dan Bakauheni dengan skala sedang.
- f. Program pembangunan jaringan prasarana berupa alur dan prasarana keselamatan pelayaran serta jaringan pelayanan yang terdiri atas pelayanan tetap, teratur serta tidak tetap dan tidak teratur.

Indikasi Program Strategis pembangunan system jaringan transportasi udara sebagai bagian dari tatanan kebandarudaraan nasional di Pulau Sumatera menurut prioritas, meliputi :

- a. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer di Kuala Namu Medandan Hang Nadim Batam dengan prioritas tinggi.
- b. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder di Bandara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan Ketaping Padang dengan prioritas tinggi.
- c. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier di Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, **Sultan Thaha Jambi**, Fatmawati Bengkulu, Depati Amir Pangkal Pinang, Radin Inten Lampung dan Ranai Natuna dengan skala prioritas sedang.
- d. Bandar udara bukan pusat penyebaran di Cut Nyak Dien Meulaboh, Rembele Takengon, Memun Saleh Sabang, Lasikin Sinabung, Teuku Cut Ali Tapak Tuan, Aek Godang Padang Sidempuan, Sibisa Parapat, Pulau Pulau Batu Nias, **Sungai Penuh Kerinci**, Dabo Singkep, Japura Rengat dan Lubuk Linggau dengan skala sedang.

Terkait dengan program prioritas menurut Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, terdapat beberapa program prioritas pembangunan sektor transportasi di Provinsi Jambi yang sudah masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2020 yaitu Pembangunan Pelabuhan Laut Ujung Jabung yang nantinya akan berfungsi sebagai Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Entry Port serta Pengembangan Bandara Bungo.

3.4.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dimaksudkan untuk mengkaji kebijakan, rencana dan/atau program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terhadap lingkungan hidup, misalnya dengan melakukan Ahli Fungsi Lahan untuk peruntukan pembangunan jalan rel KA (Trase), Pelabuhan

maupun Jembatan Timbang dan Terminal. Kajian rencana dan program ini, diakomodir melalui kebijakan RTRW Provinsi Jambi setelah diinventarisasi kebutuhan Struktur Ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten/Kota untuk peruntukan transportasi baik darat, laut/sungai maupun udara.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan beberapa identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan arah kebijakan pembangunan di sektor perhubungan dalam wilayah Provinsi Jambi diatas, maka beberapa isu-isu strategis yang berkembang antara lain adalah :

- Kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dalam mengantisipasi tingginya arus mobilitas orang/barang/jasa, perlu mendapat perhatian yang serius dan dikembangkan sesuai dengan demand yang terjadi di lapangan.
- Beban lalu lintas jalan yang semakin lama semakin berat dalam menampung arus lalu lintas penumpang maupun barang perlu ditingkatkan kelasnya minimal menjadi jalan kelas II serta perlu dicarikan pengembangan moda alternatif lainnya.
- Pengawasan muatan lebih kendaraan angkutan barang melalui Jembatan Timbang, memerlukan peningkatan kualitas fungsi dan prasarana pendukungnya sehingga mampu beroperasi secara optimal.
- Pemanfaatan sungai sebagai angkutan barang alternatif dalam rangka mengurangi beban angkutan jalan serta meminimalisir tingkat kerusakan jalan akibat muatan lebih angkutan barang khususnya Batu Bara dan CPO.
- Pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Ujung Jabung yang dapat berfungsi sebagai Outlet dan pusat pendistribusian barang/jasa maupun orang, perlu diupayakan percepatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh hinterland dan kawasan ekonomi terpadu.
- Pengembangan/pembangunan Bandara Sultan Thaha perlu dilakukan dalam rangka mengakomodir tuntutan dan demand yang terjadi serta

menjadikan Bandara Sultan Thaha sebagai bandara bertaraf internasional dan sebagai Bandara Embarkasi Haji.

- Pengembangan dan pengoperasian Bandara Depati Parbo Kerinci perlu diupayakan dalam mendukung perekonomian daerah dan sebagai angkutan alternatif dalam mendukung Kabupaten Kerinci sebagai kawasan wisata dan rest area.
- Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Ro Ro di Kuala Tungkal yang menghubungkan Kuala Tungkal (Provinsi Jambi) dengan Tanjung Uban (Provinsi Kepulauan Riau) harus segera diselesaikan dan dapat dioperasionalkan.
- Pembangunan terminal barang terpadu (dry port) sebagai feeder Pelabuhan Ujung Jabung perlu direncanakan sebagai integrasi moda angkutan.
- Perencanaan dan Pembangunan jalan Kereta Api Sumatra Railway perlu terus diupayakan, sehingga mampu menjadi angkutan alternatif dalam rangka mengurangi beban volume lalu lintas jalan.
- Percepatan penyelesaian pembangunan dan pengoperasian Bandara Bungo sebagai bandara feeder untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.2.1. Tujuan Jangka Menengah SKPD.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka visi dan misi tersebut perlu diterjemahkan kedalam tujuan strategik organisasi.

Dengan diformulasikannya tujuan strategik, maka Dinas Perhubungan akan dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Lebih daripada itu, dengan diketahuinya tujuan strategik, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan dapat mengukur tingkat keberhasilannya didalam pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam perumusan tujuan stratejik ini tidak terlepas dari program pembangunan daerah tahun 2016 – 2021.

Adapun Tujuan Strategik 5 Tahun ke depan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- ✚ Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi;
- ✚ Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, andal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien.
- ✚ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia menuju clean government dan good governance.
- ✚ Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan.





Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2021). Indikator kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> Luasan infrastruktur transportasi terbangun Jumlah fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh ruang lalu lintas, ruang kegiatan dan titik simpul transportasi terpenuhi fasilitas sarana prasarana keselamatan, 90 %
2.	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> Luasan/jumlah infrastruktur transportasi yang dipelihara/dirawat/direhab 	
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, handal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas Prosentase penurunan tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas Luasan/cakupan wilayah pelayanan jasa angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai capaian penurunan pelanggaran lalu lintas mencapai 90 %. Nilai capaian prosentase penurunan kecelakaan mencapai angka 95 %. Penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi mencapai kepuasan 95 %.
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas Sumber Daya Manusia menuju clean government dan good governance.	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata tingkat tingkat kepuasan masyarakat. Prosentase kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> Kepuasan masyarakat mencapai 99 % 50 % petugas operasional memiliki pengetahuan teknis

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata.




Berdasarkan tujuan strategis Dinas Perhubungan, maka dijabarkan sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Perhubungan tahun 2016–2021 sebagai berikut :

-  Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi dan fasilitas keselamatan transportasi yang didukung oleh system perencanaan yang berkelanjutan.
-  Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan.
-  Meningkatnya pelayanan jasa transportasi melalui pengembangan akses transportasi berbasis transportasi massal baik darat, SDP, Laut dan Udara.
-  Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, menguasai teknologi dan memiliki daya saing.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis ini adalah dengan menyusun program-program strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan tersebut adalah :

-  Pemenuhan terhadap standar keselamatan transportasi secara bertahap;
-  Upaya percepatan pembangunan sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi darat (LLAJ dan SDP), kereta api, laut dan udara yang berkelanjutan.
-  Mempertahankan standar tingkat kenyamanan, keselamatan, ketertiban, keandalan transportasi melalui rehabilitasi/ pemeliharaan sarana prasarana transportasi.

- ✚ Melakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian penyelenggaraan transportasi baik melalui uji petik maupun operasi/razia.
- ✚ Melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia melalui diklat, kursus dan lain-lain.

4.3.2. Kebijakan

Dengan melihat kondisi dan potensi sektor perhubungan di Provinsi Jambi, kebijakan pembangunan perhubungan di Provinsi Jambi diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan perekonomian di Provinsi Jambi, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan serta diversifikasi industri baik hulu maupun hilir yang berbasis pada potensi andalan daerah. Secara bersamaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan diarahkan untuk menjamin kelancaran mobilitas orang, sumber daya dan distribusi barang/jasa sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi dan mampu bersaing. Kebijakan pembangunan Sektor Perhubungan di Provinsi Jambi diarahkan sebagai berikut :

- ✓ Mempertahankan tingkat jasa pelayanan prasarana dan sarana antara lain melalui rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi;
- ✓ Melanjutkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan program pembangunan serta restrukturisasi dan reformasi di sektor transportasi;
- ✓ Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan transportasi;
- ✓ Pembangunan / peningkatan prasarana dan sarana, fasilitas keselamatan transportasi serta penyiapan dokumen perencanaan transportasi yang mampu menghubungkan seluruh wilayah, pusat produksi dan pusat distribusi melalui darat, SDP, laut dan udara. Selanjutnya dari kebijakan sektor tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan sub sektor sebagai berikut :

4.3.2.1. Sub Sektor Perhubungan Darat.

- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan jalan, fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kesadaran tertib lalu lintas kepada pengemudi kendaraan umum dan pengguna jalan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.
- ✓ Meningkatkan pembinaan dan pengembangan transportasi jalan yang menyeluruh baik di pedesaan, dalam kota, antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi, dalam rangka mewujudkan terciptanya kelancaran arus penumpang dan pendistribusian barang.
- ✓ Pengembangan angkutan umum massal berbasis bus (BRT) aglomerasi dan peningkatan kinerja angkutan umum, demi terciptanya pelayanan angkutan yang tertib, teratur, andal dan terjangkau.
- ✓ Terciptanya optimalisasi peranan dan pemanfaatan sarana/prasarana transportasi darat (LLAJ dan SDP) dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan sungai dan penyeberangan dalam menembus keterisolasian, melalui peningkatan/pembangunan dermaga/halte sungai, rehabilitasi dermaga sungai dan pemberian subsidi dengan tetap mengutamakan keselamatan dalam wujud pemasangan rambu sungai dan pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran lainnya.
- ✓ Peningkatan dan pembinaan pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan menuju ke arah lebih terjaminnya keselamatan transportasi.

- ✓ Penyediaan sarana dan prasarana angkutan sungai/pedalaman dalam rangka pemberdayaan perekonomian penduduk di daerah sepanjang aliran sungai.
- ✓ Pengembangan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai angkutan alternatif
- ✓ Upaya percepatan program penggunaan prasarana transportasi alternatif guna mengurangi beban angkutan jalan khususnya angkutan barang melalui sungai maupun moda transportasi lainnya.
- ✓ Mendukung upaya percepatan pembangunan Trans Sumatera Railway di Provinsi Jambi dalam rangka mengurangi beban angkutan jalan dan mendukung kelancaran angkutan menuju ke Outlet.
- ✓ Meningkatkan kemampuan SDM, pemantapan kelembagaan serta peningkatan koordinasi antar instansi.
- ✓ Percepatan pembentukan Forum LLAJ dan optimalisasi peran dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang ideal di daerah.

4.3.2.2. Sub Sektor Perhubungan Laut.

- ✓ Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Ujung Jabung untuk melayani arus bongkar/muat dan ekspor/impor, sehingga memenuhi persyaratan sebagai pusat distribusi dan Outlet.
- ✓ Fasilitasi upaya pengembangan dan optimalisasi pemberdayaan pelabuhan Muara Sabak (pengalihan sebagian besar operasional pelabuhan Talang Duku) yang didukung oleh

pelabuhan-pelabuhan Kuala Tungkal, Nipah Panjang dan Mendahara, dalam rangkaantisipasi terhadap tuntutan kerjasama regional dan era globalisasi.

- ✓ Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana, prasarana dan operasional pelabuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas (sesuai kewenangan).
- ✓ Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana bantu navigasi sebagai prasarana terpenuhinya standar keselamatan pelayaran.
- ✓ Koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya dukung pelayanan kesyahbandaran.
- ✓ Fasilitasi dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas daya dukung pelayanan keselamatan pelayaran.
- ✓ Fasilitasi Penataan dan relokasi pelabuhan.
- ✓ Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

4.2.2.3. Sub Sektor Perhubungan Udara.

- ✓ Fasilitasi Pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi dalam rangka mendukung pemenuhan syarat sebagai bandara bertaraf internasional.
- ✓ Fasilitasi pengembangan jalur penerbangan nasional dan internasional untuk menunjang kerjasama regional dengan tetap memperhatikan demand angkutan udara.
- ✓ Fasilitasi Peningkatan kualitas jasa bandar udara melalui peningkatan fasilitas penerbangan dan sumber daya manusia.

- ✓ Fasilitasi upaya pengembangan dan pengoperasian kembali Bandar Udara Depati Parbo sebagai bandar udara feeder untuk menunjang program pengembangan kawasan Kerinci sebagai Rest Area Provinsi Jambi.
- ✓ Fasilitasi Operasionalisasi pelayanan transportasi udara dari/ke Bandara Depati Parbo melalui sistim pola kerjasama maupun pemberian subsidi.
- ✓ Fasilitasi percepatan penyelesaian pembangunan dan pengoperasian Bandara Bungo.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan sebagai salah satu penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan merupakan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran maupun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

Penjabaran terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD dapat dilihat dalam lampiran tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur Umum	Percepatan Pembangunan Kawasan Ujung Jabung Kelancaran penyelenggaraan pelayanan transportasi darat, kereta api, laut dan udara	-Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi. -Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Luasan infrastruktur transportasi terbangun • Jumlah fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang • Luasan/jumlah infrastruktur transportasi yang dipelihara/dirawat / direhab
	Lancarnya arus pergerakan orang, barang dan jasa melalui sungai dan laut	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, handal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas • Prosentase penurunan tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas
	Percepatan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Muara Sabak sebagai simpul akselerasi ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> • Luasan/cakupan wilayah pelayanan jasa angkutan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas Sumber Daya Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata tingkat tingkat kepuasan masyarakat • Prosentase kualitas SDM.

6.1. Sumber Dana APBD Provinsi :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun-0	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	• Luasan infrastruktur transportasi terbangun.	0 %	5 Pkt	5 Pkt	5 Pkt	5 Pkt	5 Pkt	25Paket
	• Jumlah fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang.	0 %	4.290 bh 15 Unt 3 Pkt 40.000 M’	4.290 bh 16 Unt 3 Pkt 60.000 M’	4.290 bh 16 Unt 3 Pkt 120 KM	4.290 bh 16 Unt 3 Pkt 120 KM’	4.290 bh 18 Unt 3 Pkt 120 KM’	21.450 bh 80 Unit 15 Pkt 460.000 M’
	• Luasan/Jumlah infrastruktur transportasi yang dipelihara/dirawat/direhab.	0 %	3 Pkt	5 Pkt	5 Pkt	5 Pkt	5 Pkt	23 Pkt
2.	• Prosentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas.	0 %	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	5 Pkt
	• Prosentase penurunan tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas.	0 %	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	5 Pkt
	• Luasan/cakupan wilayah pelayanan jasa angkutan.	0 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %
3.	• Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat.	0 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %	95 %
	• Prosentase kualitas SDM.		15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	75 %

6.2. Sumber Dana dari APBN Kemenhub RI :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun-0	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	• Luasan infrastruktur transportasi terbangun.	0 %	5 Pkt	14 Pkt	11 Pkt	10 Pkt	9 Pkt	49 Paket	
	• Jumlah fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang	0 %	3.504 bh 6 Unit 6 Pkt 71.000 M'	3.693 bh 6 Unit 8 Pkt 71.000 M'	3.873 bh 6 Unit 8 Pkt 71.000 M'	3.898 bh 6 Unit 4 Pkt 71.000 M'	3.893 bh 6 Unit 5 Pkt 71.000 M'	18.861 bh 30 Unit 31 Pkt 355.000 M'	
	• Luasan/Jumlah infrastruktur transportasi yang dipelihara/ dirawat/direhab.	0 %	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	5 Pkt	
2.	• Prosentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas.	0 %	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	5 Pkt	
	• Prosentase penurunan tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas.	0 %	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	5 Pkt	
	• Luasan/cakupan wilayah pelayanan jasa angkutan.	0 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %	
	•								
3.	• Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat. • Prosentase kualitas SDM.	0 %	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	5 Paket	

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAMBI**

**Ir. H. SRI SAPTO EDDY, M.TP
Pembina Utama Madya
NIP. 19591005 198603 1 004**